

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

PENELITIAN DOSEN UTAMA



**PEMETAAN INDIKATOR KEMISKINAN MENURUT INDIKATOR
SOSIAL DI KABUPATEN GARUT**

Ketua: Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si (0416037002)

Anggota: Dr. Ima Amaliah, SE., M.Si (0403027101)

Mahasiswa:

Sarah Nita Hasibuan (10090213035)

Nurfitriani Lestari (10090213021)

Penelitian ini dibiayai oleh LPPM dengan No. Kontrak 02/C.12/LPPM/I/2017

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
SEPTEMBER 2017**

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN UTAMA



**PEMETAAN INDIKATOR KEMISKINAN MENURUT INDIKATOR
SOSIAL DI KABUPATEN GARUT**

Ketua: Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si (0416037002)
Anggota: Dr. Ima Amaliah, SE., M.Si (0403027101)

Mahasiswa:
Sarah Nita Hasibuan (10090213035)
Nurfitriani Lestari (10090213021)

Penelitian ini dibiayai oleh LPPM dengan No. Kontrak 02/C.12/LPPM/I/2017

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
SEPTEMBER 2017**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian

Judul Penelitian/PKM : Pemetaan Indikator Kemiskinan menurut Indikator Sosial di Kabupaten Garut

2. Ketua Penelitian

a. Nama lengkap : Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si
b. NIP : D. 95.0.212
c. NIDN : 0416037002
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Fakultas/Program : Ekonomi/Manajemen
f. Nomor HP : 08122139981
g. Alamat E-mail : ad_tasya@yahoo.com

3. Jumlah dana yang disetujui : Rp. 17.000.000,-

Bandung, Juni 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Unisba



Dr. Atih Damanik, SE., M.Si
NIK: 93.0167

Ketua Peneliti

Dr. Tasya Aspiranti, SE., M.Si
NIK: D.95.0.212



Mengetahui,

Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiate, Dra., M.Si
NIP: 195903301986012002

LEMBAR PENGESAHAN

Pemetaan Indikator Kemiskinan menurut Indikator Sosial di Kabupaten Garut

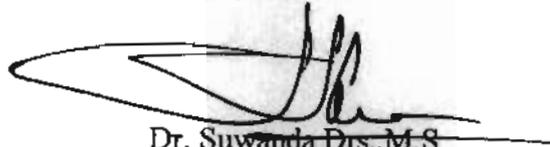
Telah Disetujui Oleh Reviewer

Reviewer 1



Dr. Nan Rahminawati, M.Pd

Reviewer 2



Dr. Suwanda, Drs., M.S

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul "*Pemetaan Indikator Kemiskinan menurut Indikator Sosial di Kabupaten Garut*".

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan di mana pada tahap pertama kami melakukan pemetaan kemiskinan dari faktor ekonomi. Pada penelitian ini kami melakukan identifikasi kemiskinan dari indikator sosial di wilayah pegunungan dan pesisir Kabupaten Garut. Temuan di lapangan menemukan faktor sosial yang paling dominan sebagai penyebab kemiskinan di wilayah pegunungan dan pesisir adalah masalah keterpencilan. Jarak yang sangat jauh dari Ibu Kota serta kontur wilayah perbukitan dengan jenis tanah yang gembur menyebabkan sering terjadi longsor pada saat musim hujan. Selain itu, ada beberapa desa yang letaknya sangat terasing dengan infrastruktur jalan yang jauh dari kata memadai menyebabkan masyarakat terisolir dari dunia luar. Efeknya masyarakat memanfaatkan gunung sebagai sumber mata pencaharian yang berakibat pada pengrusakan gunung dan kesulitan akses air bersih.

Tim peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM yang telah mendanai penelitian ini, para reviewer yang telah memberikan banyak masukan serta para alumni (Sarah dan Hana) yang telah membantu survey di lapangan. Penelitian ini masih akan dilanjutkan dengan mengkaitkan peran LKMS dalam upaya penuntasan kemiskinan di wilayah pegunungan dan pesisir Kabupaten Garut.

Demikian laporan akhir ini kami buat, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan di Kabupaten Garut. Terima kasih.

Bandung, September 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Reviewer	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang Masalah	1
1.2 Urgensi Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi Kemiskinan	8
2.2 Ukuran/Kriteria Kemiskinan	11
2.3 Indikator Kemiskinan dari Aspek Ekonomi	14
2.4 Indikator Kemiskinan dari Aspek Sosial	15
2.5 Jenis-jenis Kemiskinan	18
2.6 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	21
2.7 Kemiskinan di Perdesaan	23
2.8 Lembaga Keuangan Mikro	25
2.9 Lembaga Keuangan Mikro di Perdesaan	27
2.10 Road Map Penelitian	30
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	31
3.1 Tujuan Penelitian	31
3.1.1 Tujuan Umum	31
3.1.2 Tujuan Khusus	31
3.2 Manfaat Penelitian	31
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	32
4.1 Jenis Penelitian	32
4.2 Teknik Pengumpulan Data	32
4.3 Tahapan Penelitian dan Target Capaian Kegiatan	32
4.4 Kerangka Wilayah	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Pemetaan Kemiskinan Sosial Berdasarkan Kontur Wilayah	37
5.1.1 Kemiskinan Sosial di Kecamatan Talegong (Wilayah Pegunungan)	37
5.1.2 Kemiskinan Sosial di Kecamatan Mekarmukti (Wilayah Pesisir)	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN	49
6.1 Kesimpulan	49
6.2 Saran Kebijakan	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabuapten Garut Tahun 2009-2015	2
Tabel 1.2	Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	4
Tabel 4.1	Tahapan Penelitian	33
Tabel 5.1	Wilayah/Komunitas Terpencil di Kecamatan Talegong Tahun 2016	38
Tabel 5.2	Jumlah Difabel di Kecamatan Talegong Tahun 2016	39
Tabel 5.3	Jumlah Pertahanan Sejahtera per desa di Kecamatan Talegong Tahun 2016	40
Tabel 5.4	Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Talegong berdasarkan Penerima Program Raskin Tahun 2016	41
Tabel 5.5	Data Kesakitan di Kecamatan Talegong Tahun 2016	42
Tabel 5.6	Akses Air Bersih Kecamatan Talegong Tahun 2016	43
Tabel 5.7	Wilayah/Komunitas Terpencil di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	44
Tabel 5.8	Jumlah Pertahanan Sejahtera per desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	45
Tabel 5.9	Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	45
Tabel 5.10	Jumlah Warga Difable di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	46
Tabel 5.11	Tingkat Kesakitan di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016	47
Tabel 5.12	Akses Air Bersih di Kecamatan Mekarmukti	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Road Map Penelitian	30
Gambar 4.1	Kerangka Wilayah	36

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan kemiskinan berdasarkan kontur wilayah dengan indikator sosial. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah teridentifikasinya desa termiskin berdasarkan indikator sosial di wilayah pegunungan dan di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Garut.

Metode penelitian yang akan digunakan metode penelitian kualitatif melalui dukungan data deskriptif kuantitatif. Tahapan dari penelitian ini adalah pengumpulan data dan analisis data secara simultan, penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Dari pengumpulan data dibuat reduksi data untuk memilah data yang relevan dan bermakna yang selanjutnya disajikan. Dalam proses reduksi data, penelitian memilah data yang relevan bermakna, memfokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti kemudian menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dengan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting tentang hasil dan temuan penelitian.

Dari hasil analisis data teridentifikasi faktor sosial penyebab kemiskinan di Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti adalah karena masalah keterpencilan dan keterasingan dari wilayah ibu kota Kabupaten Garut. Ada 3 Desa di wilayah kecamatan ini yang sosisinya sangat terpencil sehingga sulit untuk mengakses berbagai sumber daya yang memadai. Kemiskinan di wilayah ini semakin parah karena kontur wilayah ini adalah perbukitan dengan jenis tanah yang sangat gembur. Dengan demikian, masalah sosial lainnya sebagai penyebab kemiskinan di wilayah ini karena rawan bencana alam. Ada 14 titik longsor di wilayah ini. Keterasingan dan keterpencilan telah menyebabkan masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup akan pendidikan dan kesehatan yang berefek pada tingginya angka kecacatan mental dan fisik di wilayah ini. Kemiskinan secara sosial telah memperburuk pengelolaan lingkungan yaitu gundulnya gunung yang ada di wilayah tersebut dikarenakan masyarakat menggunakan perbukitan dari gunung yang bersangkutan sebagai tempat berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Efeknya masyarakat di sekitar gunung sulit untuk mendapatkan air bersih. Kemiskinan sosial di wilayah Kecamatan Mekarmukti sebagai wilayah pesisir dikarenakan ketarsingan, keterpencilan dari wilayah Kabupaten Garut. Jarak yang sangat jauh dengan wilayah ibu kota Kabupaten menyebabkan wilayah ini sulit untuk mengakses berbagai sumber daya untuk kehidupan yang layak. Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan karena sebegini besar masyarakat hanya sebagai butuh tani dan nelayan. Efeknya masyarakat hanya mengenyam pendidikan SD. Di wilayah ini, banyak masyarakat menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, stroke dan asma juga cacat fisik dan mental meskipun tidak separah di Kecamatan Talegong. Faktor sosial lainnya seperti penyimpangan sosial, bencana alam dan tindakan kekerasan tidak ditemukan sebagai sumber penyebab kemiskinan.

Kata Kunci: *Pemetaan, Kemiskinan Sosial, Rawan Bencana*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang belakangan intens dibahas diberbagai pihak terkait, terutama pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai penentu kebijakan. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Khususnya di Jawa Barat, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai bulan September 2014 adalah sebanyak 4.238.960 orang (9,18% dari jumlah penduduk). Proporsi ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat cukup tinggi. Fenomena lainnya memperlihatkan bahwa di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin mencapai 10,88 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 8,32 pesen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan di Jawa Barat.

Dari hasil penelitian Aspiranti, Ima Amaliah, Pupung Purnamasari dan Sri Suwarsi (2016) menemukan Kabupaten Garut merupakan wilayah termiskin setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut jika dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan serta banyaknya protein yang dikonsumsi masyarakat nampak Kabupaten Garut memiliki tingkat pengeluaran yang paling kecil. Sementara jika dilihat dari luas lantai per kapita, Kabupaten Garut memiliki luas lantai paling sempit. Dari aspek kepemilikan sarana prasarana telekomunikasi Kabupaten Garut pun belum memiliki akses yang cukup memadai teknologi informasi (telpon rumah maupun komputer). Berikut adalah indikator kemiskinan Kabupaten Garut

**Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabuapten Garut
Tahun 2009-2015**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	154.245	180.406	202.350	213.707	226.308	234.661	241.068
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	410,6	335,6	330,9	315,8	320,9	315,6	325,7
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	17,87	13,94	13,5	12,72	12,79	12,47	12,81
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,24	1,8	1,93	1,79	1,73	1,77	2,07
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,22	0,34	0,47	0,4	0,41	0,38	0,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Garut mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kabupaten Garut sebesar 241.068 rupiah/kep/bulan. Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif yakni pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten garut adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi lemah, serta kurangnya program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk penanggulangan atas problem sosial.

Meskipun selama 30 tahun terakhir, Kabupaten Garut melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, strategi maupun kebijakan khusus, seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga (Prokesos KUBE), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, PNPM Mandiri, dan sebagainya, namun, berbagai kebijakan program tersebut banyak mengalami hambatan dan kekurangan pada tataran

implementasinya. Oleh karenanya, angka kemiskinan tetap tinggi di Kabupaten Garut.

Masalah kemiskinan dan ketertinggalan Kabupaten Garut diantara kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Barat menjadi isu utama dalam perkembangan wilayah di Kabupaten Garut. Jika dilihat secara internal, Kabupaten Garut mengalami ketimpangan antara Kabupaten Garut bagian selatan dan Kabupaten Garut bagian utara. Kabupaten Garut bagian utara relatif bersifat kekotaan dapat terlihat dengan jelas dibandingkan dengan Kabupaten Garut bagian selatan. Karakteristik Garut bagian selatan sebagian besar merupakan perbukitan yang merupakan salah satu faktor lambatnya perkembangan wilayah ini. Aksesibilitas yang memegang peranan penting di wilayah ini dirasa kurang, terutama dalam hal kualitas jalan. Selain itu, masih rendahnya sumber daya manusia dan kemampuan keuangan lokal yang kurang serta minimnya sarana dan prasarana sehingga berdampak pada lambatnya perkembangan wilayah ini. Kabupaten Garut bagian selatan juga cenderung mengalami kesulitan dalam percepatan pembangunannya karena karakteristik wilayahnya yang merupakan sebagian besar perbukitan.

Menurut PDTT, 2016 Kabupaten Garut bagian selatan terdapat beberapa kecamatan yang berstatus kecamatan tertinggal diantaranya Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti. Secara umum karakteristik wilayah Kecamatan Talegong merupakan daerah pegunungan, sedangkan Kecamatan Mekarmukti merupakan daerah di pesisir pantai. Kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi. Berikut adalah jumlah kemiskinan di Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti.

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

Desa	Jumlah KK
Selaawi	441
Sukamaju	566
Sukamulya	541
Mekarmulya	288
Mekarmukti Talegong	208
Sukalaksana	598
Mekarwangi	145
Mekarmukti	441
Mekarsari	402
Cijayana	312
Jagabaya	253
Karangwangi	434
Total	4.629

Sumber: Dokumen Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah keluarga miskin masih sangat tinggi. Jumlah keluarga miskin tertinggi berada pada Desa Sukalaksana, Desa Sukamaju dan Sukamulya. Adapun penyebab tingginya angka keluarga miskin adalah tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yakni berkisar antara Rp. 500.000-600.000 rupiah, tingkat pendidikan masyarakat mayoritas tamatan sekolah dasar dan terbatasnya prasarana jalan yang dapat mempermudah akses masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selama ini, potret kemiskinan lebih banyak terfokus pada aspek ekonomi saja, padahal kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi yaitu menyangkut pula masalah sosial, politik, kelembagaan dan lain sebagainya. Pada tahap kedua ini, tim peneliti ingin memetakan indikator kemiskinan dari faktor sosial di wilayah Garut bagian selatan khususnya Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti.

1.2 Urgensi Penelitian

Dari data yang dipublikasikan BPS tahun 2015 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 4.485.654 orang. Adapun kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Bogor 479,1 orang (9.53%), Kabupaten Garut sebanyak 325.000 orang dan Kabupaten Cirebon sebanyak 300,5 orang (14.65%). Apabila ditelusuri lebih lanjut, Kabupaten Garut memiliki jumlah pengeluaran paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 234.420 dan non makanan sebesar Rp. 172.069 disusul Kabupaten Cianjur pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 268.032 dan non makanan Rp. 182.461 (BPS, 2014).

Untuk melihat lebih lanjut, kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut dengan memperhatikan struktur perekonomiannya. Struktur perekonomian Kabupaten Garut didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share sebesar 39,11 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 20,41 persen dan sektor industri pengolahan 7.42 persen. Namun di dalam perkembangannya kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan terus menurun. Penurunan kedua sektor ekonomi ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada menurunnya penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Garut. Artinya, meningkatnya angka pengangguran serta meningkatnya migrasi penduduk ke luar Garut yang akan berefek pada menurunnya penyediaan SDM yang berkualitas. Kondisi ini terlihat pada posisi garis kemiskinan di Kabupaten Garut di mana pada saat ini Kabupaten Garut sebagai wilayah paling tertinggal di Jawa Barat. Garis kemiskinan terendah di Kabupaten Garut yaitu sebesar Rp. 226.308 per bulan serta tingkat keparahan kemiskinan mencapai 0.41.

Selain itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Barat, pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Garut sebesar Rp. 234.420 dan non makanan sebesar Rp. 172.069 serta pengeluaran untuk protein juga paling rendah yaitu hanya 41.67 gram per hari (BPS, 2014). Padahal kualitas makanan akan menentukan tingkat kecerdasan dan ketahanan seorang individu terhadap berbagai penyakit. Gizi yang baik akan menyebabkan masyarakat memiliki

ketahanan yang baik terhadap berbagai penyakit, efeknya masyarakat akan lebih produktif dalam bekerja yang berujung pada tingginya pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang memadai maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan serta kebutuhan lainnya yang akan memotong rantai kemiskinan di masyarakat itu sendiri.

Selain itu, jika dilihat dari kesempatan masyarakat untuk menikmati layanan telekomunikasi seperti telpon rumah, komputer, internet dan lainnya, di Kabupaten Garut juga menempati posisi yang rendah yaitu hanya 3,44%. Padahal ketersediaan teknologi informasi akan membantu masyarakat untuk bekerja lebih efisien. Masyarakat tidak harus memasarkan produknya hanya di pasar riil tetapi juga melalui media online. Efeknya perekonomian akan lebih berkembang dan akan banyak lapangan kerja yang dapat diciptakan masyarakat Kabupaten Garut (BPS, 2014).

Kabupaten Garut terdiri dari dua kelompok, yakni Kabupaten Garut bagian selatan dan Kabupaten Garut bagian utara. Kabupaten garut bagian utara lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten Garut bagian selatan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Garut bagian utara merupakan pusat kota. Kabupaten Garut selatan terdiri dari 16 kecamatan dan 126 desa. Garut Selatan sebagian besar merupakan daerah pertanian baik berupa pertanian lahan basah maupun lahan kering. Wilayah Garut Selatan merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak berupa kesuburan tanah, air yang berlimpah, barang tambang, pemandangan alam yang indah, dan lain-lain. Di samping itu, sumber daya manusia cukup besar merupakan potensi yang harus diberdayakan untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah tersebut.

Kabupaten Garut bagian selatan terdapat dua kecamatan yang berstatus tertinggal diantaranya adalah Kecamatan Mekarmukti dan Kecamatan Talegong. Kedua kecamatan ini memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi yakni sebesar 4.269 keluarga. Hal ini disebabkan wilayah ini didominasi oleh lahan kehutanan dan pertanian sehingga pemasukan terbesar wilayah ini adalah pertanian. Akses menuju kedua kecamatan sangat sulit, karena minimnya sarana transportasi dan kondisi jalan kecamatan maupun jalan desa yang sebagian besar

rusak dan sempit. Sulitnya akses jalan menyebabkan masih ada beberapa wilayah yang terisolir dan terpencil dan kondisi perkampungan yang jauh dari kampung yang lain serta akses penerangan yang kurang. Wilayah terpencil ini banyak terdapat di Kecamatan Talegong seperti Desa Sukamulya dan Desa Sukalaksana. Selain itu, kedua kecamatan ini merupakan wilayah yang rawan longsor, hampir setiap turun hujan daerah ini terkena longsor.

Melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut, menjadi urgen untuk memetakan lebih lanjut indikator kemiskinan di Kabupaten Garut dilihat dari indikator sosial, sehingga dapat dibuatkan kebijakan penentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan partisipatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Definisi kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap kelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya setiap negara, termasuk Negara Indonesia memiliki definisi sendiri mengenai tentang seseorang/suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikategorikan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Surwayati, 2004:122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan kehidupan sosial dan politik.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menambahkan kemiskinan didirikan oleh kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial, dan budaya (Barrientos, 2010). Sementara Bank Dunia (*World Bank*) dalam *World Bank Institute* definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada dibawah batasan tersebut maka mereka dianggap miskin.

Kemiskinan menggambarkan keadaan dimana individu atau rumah tangga berada dalam kondisi yang sangat kekurangan dalam kesejahteraan. Barrientos (2010) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensi serta memiliki dampak yang sangat luas terhadap kualitas hidup manusia. Isu kemiskinan menjadi persoalan global umat manusia, karena saat ini

jumlah penduduk di negaraberkembang masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Kartasmita (1997:234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dalam pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasmita mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Suyanto (1995:59) mendefinisikan kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya.

Menurut Sastraamadja (2003) kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat pola waktu, yaitu: (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering mengikiti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty* adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian; dan (4) *accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan

kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya alam dalam konteks ini adalah menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Menurut Amartya dalam Bloom and Canning (2011) bahwa seorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan keterbatasan yang substantif. Menurut Bloom and Canning kebebasan substantif ini memiliki dua sisi yaitu, kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

2.2 Ukuran/ Kriteria Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Badan Pusat Statistik menyusun beberapa indikator dan kriteria yang termasuk miskin, yaitu :

1. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi.
2. Jenis lantai terluas terbuat dari kayu murahan, tanah, bambu.
3. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa plester, bambu, rumbia).
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (kamar mandi).
5. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak.
6. Sumber penerangan utama bukan listrik.
7. Bahan bakar untuk masak bersumber pada kayu dan arang.
8. Tidak mampu membeli daging, susu, telur dan ikan minimal dalam 1 minggu sekali.
9. Makan kurang dari 2 kali sehari.
10. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun.

11. Tidak mampu membayar untuk berobat ke sarana kesehatan modern.
12. Pendapatan kurang dari Rp 600.000,- per rumah tangga per bulan.
13. Pendidikan tinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD ke bawah.
14. Kepemilikan tabungan atau aset kurang dari Rp 500.000,-

Dalam hal ini, yang disebut keluarga miskin adalah keluarga atau masyarakat yang memiliki minimal 9 dari 14 indikator diatas (Maipita,2014 : 54).

Ukuran kemiskinan juga diperkenalkan oleh UNDP (dalam Todaro, 2006) yaitu pengukuran tingkat kemiskinan melalui indeks kemiskinan manusia (Human Poverty Indeks-HPI) kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama yaitu:

1. Kehidupan (lebih dari 30% penduduk negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun).
2. Pendidikan dasar (diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf), serta
3. Keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase penduduk tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan berat badan).

Garis kemiskinan lain dikemukakan oleh Prof. Sajogyo yaitu garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo (1997) dalam Zulfakar (2005) mendefinisikan batas kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita per tahun yang sama dengan beras, menurutnya konsumsi beras merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kekayaan rumah tangga. Berdasarkan metode tersebut kemiskinan rumah tangga dibedakan menjadi:

- a. Sangat miskin, adalah rumah tangga dengan pendapatan perkapita per tahun dibawah nilai 240 kg beras untuk perdesaan dan 480 kg untuk perkotaan.
- b. Miskin, merupakan rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan dengan nilai antara 320 kg beras untuk perdesaan dan untuk perkotaan sebesar 480 kg beras.

- c. Hampir miskin, yaitu rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan dengan nilai antara 320-480 kg beras untuk perdesaan dan 480-720 kg untuk daerah perkotaan.
- d. Tidak miskin adalah rumah tangga dengan pendapatan perkapita tahunan diatas nilai 480 kg beras untuk perdesaan dan diatas 720 kg untuk perkotaan.

Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional (BKKBN) juga mengukur ukuran rumah tangga miskin. BKKBN mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam lima kelompok, yaitu :

1. Keluarga prasejahtera atau sangat miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebtuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I atau miskin, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis sperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-prikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (Maipita, 2014 : 52).

2.3 Indikator Kemiskinan dari Aspek Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pandangan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran.

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu satu tahun. Besarnya pendapatan perkapita dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun (Todaro, 2006). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

2. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompokreferensi yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini mendefinisikan sebagai penduduk kelas marginal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit diatas garis garis kemiskinan. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar untuk mengukur daya beli masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan (Suryawati, 2004).

2.4 Indikator Kemiskinan dari Aspek Sosial

Masalah kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya karena menggunakan cara pandang ekonomi. Proses pembangunan yang berlangsung selama ini telah melahirkan fenomena kemiskinan dengan ciri yang amat kental, misalnya keterbelakangan, keterpencilan, ketidakberdayaan dan ketersisihan. Ciri ini bahkan seringkali dianggap sebagai derivasi paling buruk dari fenomena kemiskinan. Proses pembangunan yang terlalu ekonomi-sentris seperti yang dipraktekkan selama ini, telah menyebabkan rapuhnya nilai-nilai sosial (*social values*) dan memudarnya kohesi sosial (*social cohesion*) dalam masyarakat. Dalam perekonomian seringkali terjadi berbagai kerusuhan sosial (*social unrest*), konflik vertikal dan horizontal, perampasan, kriminalitas, dan seterusnya. Mungkinkah semuanya ini terjadi karena masyarakat miskin secara social?.

Secara ekonomi mungkin kelompok ini tidak terkatagori pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun karena kondisi interaksi sosial antar masyarakat yang buruk maka bermunculan prasangka buruk antara golongan satu dengan golongan yang lainnya, sehingga munculah kerusuhan sosial, konflik vertikal dan horizontal dan lainnya.

Kondisi sosial semakin memburuk karena semangat individualistik dan kehidupan hedonisme semakin menemukan bentuknya. Akibatnya, solidaritas sosial dan sikap empati menjadi sesuatu yang mahal dan langka. Di tengah situasi seperti itu, solusinya adalah menumbuhkan kembangkan sikap hidup sosial yang lebih egaliter, sebuah sikap yang lebih menghargai persamaan dan distribusi pendapatan yang lebih merata antar lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah bagaimana membangun sebuah mekanisme yang mampu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk "menyerahkan" sebagian dari total pendapatannya guna mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih egalitarian.

Dalam pandangan *egalitarian income distribution* yang diperkenalkan oleh Sir Hugh Dalton, seorang profesor keuangan publik di *London School of Economics*, seluruh masyarakat sesungguhnya menghendaki pemerataan, persamaan hak, dan keadilan sosial yang lebih baik guna mewujudkan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Kerangka konseptual dan metodologi untuk

pengukuran kemiskinan pun seyogyanya tidak melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki, melainkan orang yang memiliki potensi (sekecil apa pun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya.

Kemiskinan dapat dikaitkan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang lain. Hal yang sama juga dijumpai dalam usaha untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan. Konsep taraf hidup (*level of living*) misalnya, tidak hanya cukup dilihat dari sudut pendapatan, tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial yang lain. Menurut BPS dalam Zulkifli (2013), kemiskinan yang dilihat dari aspek sosial, yaitu:

- 1) **Ketidakmampuan sosial** ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: keluarga fakir miskin; keluarga rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.
- 2) **Keterlantaran**, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti balita terlantar, anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan lansia terlantar.
- 3) **Kecacatan**, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: cacat veteran, cacat tubuh, cacat mental (retardasi, cacat mental psikotik), tuna netra, tuna rungu wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis.
- 4) **Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku**, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, seperti: tuna susila, anak konflik dengan hukum/ nakal, bekas narapidana, korban narkoba, gelandangan; pengemis, korban HIV/AIDS dan eks penyakit kronis terlantar.
- 5) **Keterasingan/ keterpencilan** dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

- 6) **Korban Bencana Alam dan Sosial**, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- 7) **Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi**, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, wanita korban tindak kekerasan, Lanjut Usia korban tindak kekerasan; dan pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi kemiskinan secara sosial di wilayah Kabupaten Garut.

Kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan *material* (perspektif ekonomi), tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berikut ini (perspektif sosial):

- a. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air bersih.
- b. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja diatas tanah pertanian.
- c. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan.
- d. Lemahnya jaminan rasa aman.

- e. Lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.
- f. Besarnya beban kependudukan, yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Rumah tangga miskin (RTM) mempunyai rata-rata anggota keluarga besar daripada rumah tangga tidak miskin.

2.5 Jenis-jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang,

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan Negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan

sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8).

Selain itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). yaitu: (1) *Kemiskinan natural*, (2) *Kemiskinan kultural*, dan (3) *Kemiskinan struktural* (Kartasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23).

- 1) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia

maupun sumber daya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya menadapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasmita (1996: 235) disebut sebagai "*Persistent Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

- 2) Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
- 3) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21).

2.6 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Untuk menanggulangi kemiskinan masalah kemiskinan diperlukan upaya memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar diberbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi dua (2), yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi upaya menciptakan

ketentraman dan kestabilan situasi politik, mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup pengembangan data dasar (*base data*) dalam penentuan kelompok sasaran (*targeting*), penyediaan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan), penciptaan kesempatan kerja, program pengembangan wilayah dan pelayanan perkreditan.

Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perpres tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun prioritas penanggulangan kemiskinan menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Unifikasi sistem penetapan sasaran nasional
2. Menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin.
3. Menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan program keluarga harapan.
4. Integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam pnpm.
5. Mengembangkan peta jalan sistem keuangan inklusif untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Pertama pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah

yakni berpihak kepada orang miskin, kedua, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, pendekatan pendampingan artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping profesional sebagai fasilitator, komunikator dan administrator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian (Soegijoko, 1997).

2.7 Kemiskinan di Pedesaan

Pedesaan adalah bagian integral dari suatu negara maka berarti kemiskinan pedesaan juga merupakan kemiskinan negara. Di samping itu, kemiskinan pedesaan juga sebagai salah satu penyebab terjadinya urbanisasi yang kurang diinginkan dan akan menyebabkan terjadinya *regional disparity*. Oleh karena itu, pedesaan haruslah ditangani secara lebih serius agar kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan. Suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri tingkat sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia relatif masih rendah, padahal pedesaan memberikan andil yang cukup besar terhadap perekonomian nasional melalui kontribusi sektor ekonomi pedesaan (Wikipedia, 2017).

Kemiskinan di pedesaan ditandai dengan berbagai macam permasalahan, adapun yang menjadi masalah di suatu wilayah atau khususnya desa disebabkan beberapa faktor:

1. Faktor internal

a. Keterbatasan pengetahuan

Keberhasilan kegiatan pembangunan tidak hanya memerlukan dukungan investasi modal fisik semata, melainkan juga sumber daya manusia. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai, akan terjadi ketidakmampuan dalam menjalankan investasi di berbagai sektor perekonomian dan sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dicapai secara berkelanjutan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap daerah, dimana keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic need*) bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

b. Keterbatasan modal usaha

Pelaksanaan pemberian kredit secara efektif mengalami beberapa hambatan, diantaranya karena amat beragamnya kelompok sasaran yang hendak dijangkau, dan kesukaran mengkompromikan kriteria efisiensi dan efektivitas kredit. Selain itu, kendala lainnya disebabkan oleh kurangnya akses warga miskin atas lembaga keuangan yang ada di sekitarnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya barang jaminan yang dimiliki warga miskin yang dapat dijadikan sebagai agunan pada suatu lembaga keuangan. Untuk menanggulangi kemiskinan, kaum miskin perlu diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman. Hanya saja mereka sulit berhubungan dengan bank, karena tidak memiliki agunan.

Bagi rumah tangga miskin, kredit merupakan sarana untuk menciptakan pendapatan melalui bekerja dan berusaha berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki dan potensi lingkungan ekonomi dimana ia berada. Kredit yang tepat, murah, dan mudah yang dikelola berdasarkan adat dan budaya setempat merupakan salah satu sarana penting yang amat membantu melancarkan kegiatan perekonomian. Ringkasnya, fungsi kredit adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, khususnya yang tergolong miskin dan mendekati miskin (*near poor*).

c. Kurang potensialnya jenis pekerjaan yang dimiliki

Keterbatasan pengetahuan menyebabkan rumah tangga miskin melakoni jenis pekerjaan yang relatif kurang potensial. Keterbatasan mengakses lapangan pekerjaan yang menjanjikan serta banyaknya masyarakat yang bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mereka tergolong miskin atau tergolong pada pekerja yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Pada umumnya informasi yang diperoleh sangat jelas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung tidak memiliki pekerjaan tetap, namun tidak juga dapat dikategorikan tidak bekerja atau pengangguran terbuka karena dari sisi jam kerja melebihi jam kerja normal (35 jam/minggu).

d. Pola hidup konsumtif

Streotype malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan. Pada kenyataannya kultur nelayan jika dicermati secara mendalam justru memiliki etos kerja yang handal. Mereka pergi subuh pulang siang, bahkan pada masa tertentu nelayan terpaksa harus beberapa hari di laut dan menjual ikan hasil tangkapan di laut melalui para tengkulak yang menemui mereka di tengah laut, kemudian menyempatkan waktu pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Dengan demikian, tidak pantas jika kita mengatakan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun ternyata kendalanya adalah terletak pada pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika musim paceklik datang, pada akhirnya mereka berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisinya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya perhatian pemerintah

Selain masalah keterbatasan pengetahuan, modal usaha, dan lapangan pekerjaan, kemiskinan pedesaan khususnya kalangan petani juga disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pertanian. Kondisi wilayah yang cukup memprihatinkan karena masih adanya sistem pertanian sawah tadah hujan. Tentu saja kondisi yang demikian ini membuat kaum petani sangat tergantung pada alam, karena pengolahan sawah hanya dilakukan pada satu kali musim saja. Jika demikian, apakah kemiskinan yang diderita kaum papa ini disebut kemiskinan alamiah atau kemiskinan struktural.

b. Ketergantungan pada Alam

Rumah tangga miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Rumah tangga miskin yang tinggal di daerah pedesaan dan kawasan pesisir sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan (Muhtar,2013).

2.8 Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Bank Indonesia (2006), lembaga keuangan mikro (LKM) dalam pengertian yang umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: (1) LKM berbentuk bank, yaitu BPR dan Unit Mikro dari Bank Umum; (2) LKM berbentuk koperasi, yaitu KSP, USP, KJKS, UJKS; serta (3) LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K) seperti BKD dan LPKD yang tidak memenuhi syarat dalam UU Perbankan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Kredit yang tidak memiliki izin pendirian koperasi, dan sebagainya. LKM B3K selanjutnya dikenal sebagai LKM Informal.

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposit*), kredit atau pembiayaan (*loan/financing*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro (Wijaya, 2007:32).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004:124) menyatakan bahwa "LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil." Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), (2004) dalam Ashari (2006:148) bahwa "LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut."

Berdasarkan bentuknya, LKM dibagi menjadi tiga (Wijono, 2005; Direktorat Pembiayaan, Deptan, 2004) yaitu: (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. Sementara Usman et al. (2004) membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun non bank; (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan nonbank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya (Rudjito, 2003).

2.9 Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah selama ini (Anugrah, 2007). Desa merupakan tolak ukur dari miskin atau tidaknya suatu negara, karena sampai saat ini desa merupakan kantong kemiskinan yang paling besar. Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani, yaitu pola ekonomi yang berorientasi subsisten. Seperti yang dikatakan oleh (Hamid, 1986)

bahwa kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan.

Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal (Pantoro, 2008). Pertama, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena mewujudkan *broad bases development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata tabungan dan kredit, guna menghindarkan pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal penawaran

(tabungan) dan permintaan (kredit). Berdirinya LKM merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UKM, sehingga peranannya bisa dibilang sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat potensi dan permasalahan LKM dalam pembangunan perekonomian di pedesaan, diantaranya ialah sebagai berikut (Mirah, 2009):

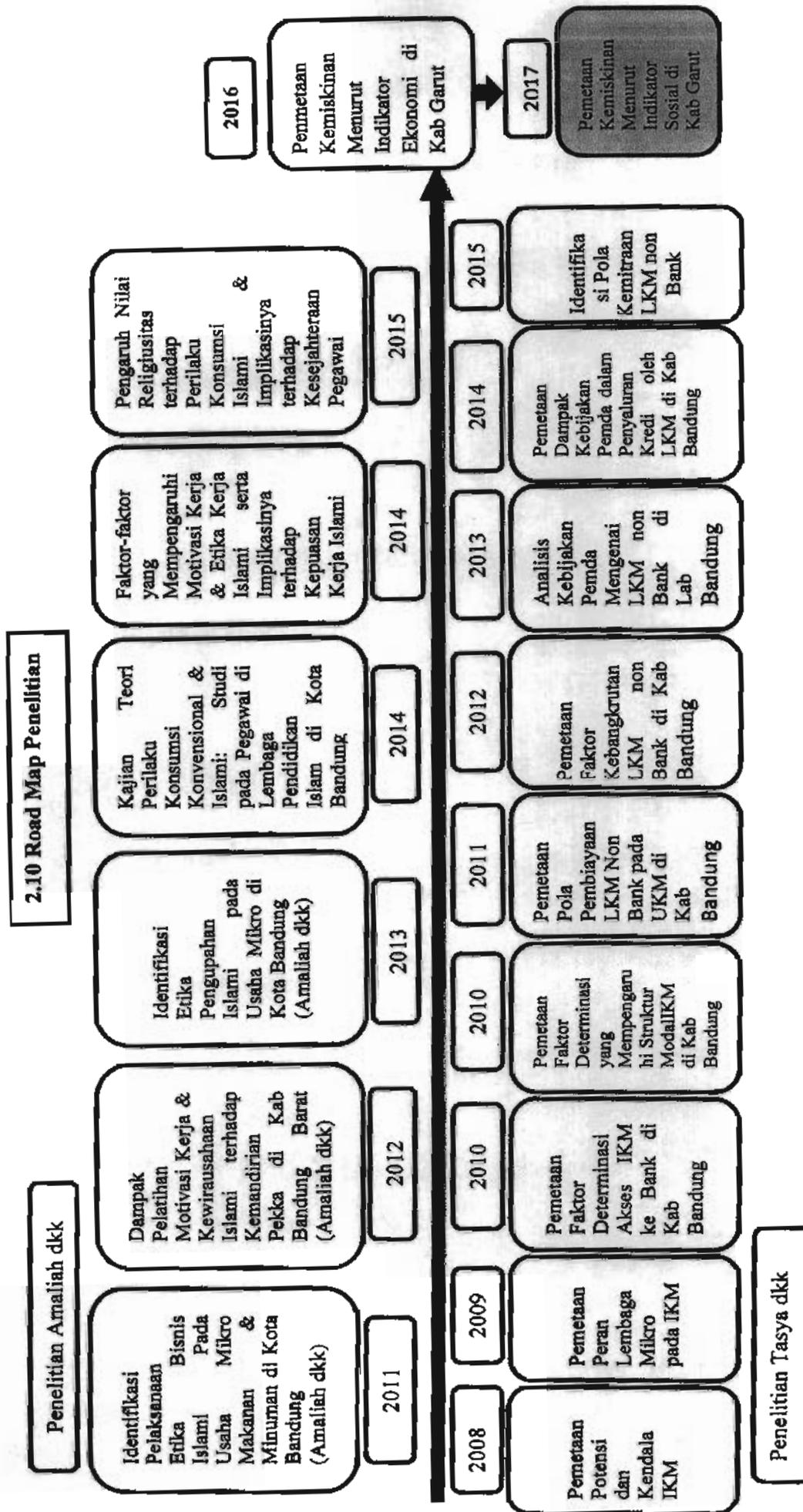
1. Potensi dan peran LKM

Pemberdayaan usaha kecil dipandang mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari peran usaha kecil yang strategis baik dilihat dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan kerja.

2. Permasalahan yang Dihadapi LKM

Perkembangan LKM masih dihadapkan pada berbagai kendala baik bersifat internal maupun eksternal yang kurang kondusif. Menurut Wijono (2005) permasalahan eksternal yang dihadapi LKM adalah aspek kelembagaan, yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM yang beraneka ragam. BRI Udes dan BPR, misalnya adalah bentuk LKM yang secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia. LKM jenis ini lebih terarah dan bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain menghadapi masalah eksternal, LKM juga dihadapkan pada masalah internal yang menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Di antara permasalahan internal adalah menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana. Sebagian besar LKM masih terbatas kemampuannya karena masih tergantung kepada jumlah anggota/nasabah serta besarnya modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam mengelola usaha sebagian besar juga masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan LKM, bahkan bisa menjadi factor penghambat yang cukup serius (Mirah, 2009).



Gambar 2.1 Road Map Penelitian

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1 Tujuan Umum

Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dibangun suatu model terintegrasi dan *sustainable* yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat khususnya untuk pemerintah Kabupaten Garut untuk memberdayakan masyarakat miskin di desa tertinggal di Kabupaten Garut secara mandiri maupun partisipatif melalui Lembaga Keuangan Mikro yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

3.1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kemiskinan dengan indikator sosial di wilayah pegunungan.
2. Analisis kemiskinan dengan indikator sosial di wilayah pesisir.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang berkelanjutan dalam penanganan kemiskinan.
2. Menambah referensi bagi para peneliti yang akan dan sedang melakukan kajian penguatan lembaga keuangan non bank untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk melakukan identifikasi dan analisis indikator kemiskinan dilihat dari indikator social di Kabupaten Garut. Dalam penelitian kualitatif terjadi proses pengumpulan data dan analisis data secara simultan. Terjadi proses simultan antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan. Dari pengumpulan data dibuat reduksi data untuk memilah data yang relevan dan bermakna, yang selanjutnya disajikan. Dalam proses reduksi data, peneliti memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, dan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti kemudian menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dengan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting tentang hasil dan temuan penelitian.

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian, maka data yang diperlukan dalam hal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Garut sebagai penentu atau subjek kebijakan. Data sekunder berupa dokumen berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan maupun diimplementasi oleh Pemerintah Kabupaten Garut serta data-data sosial di desa-desa yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

4.3 Tahapan Penelitian dan Target Capaian Kegiatan

Tahapan Penelitian dan Target Capaian Kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan penelitian adalah:

Tabel 4.1 Tahapan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Indikator Capaian Kegiatan
1	Menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya mengenai Lembaga Keuangan Mikro (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).	Hasil analisis dan evaluasi hasil penelitian sebelumnya mengenai LKM
2	Melakukan studi dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder dan mengevaluasi berbagai Kebijakan Pemerintah Jawa Barat Bandung yang relevan dengan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro di perdesaan.	Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Jawa Barat Bandung yang relevan dengan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro di perdesaan.
3,4	Melakukan <i>breakdown</i> indikator kemiskinan dilihat dari faktor ekonomi sebagai instrumen pengambilan data sekunder. Melakukan <i>breakdown</i> indikator kemiskinan dilihat dari faktor sosial untuk dijadikan sebagai instrumen kuesioner, pedoman wawancara dan observasi sebagai instrumen untuk pengumpulan data primer.	Indikator kemiskinan dilihat dari faktor sosial dan ekonomi pada masyarakat Jawa Barat
5	Memberikan pemetaan wilayah desa tertinggal di Jawa Barat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan indikator kemiskinan dilihat dari faktor ekonomi.	Pemetaan wilayah desa tertinggal di Jawa Barat yang berada di bawah garis kemiskinan dilihat dari faktor ekonomi

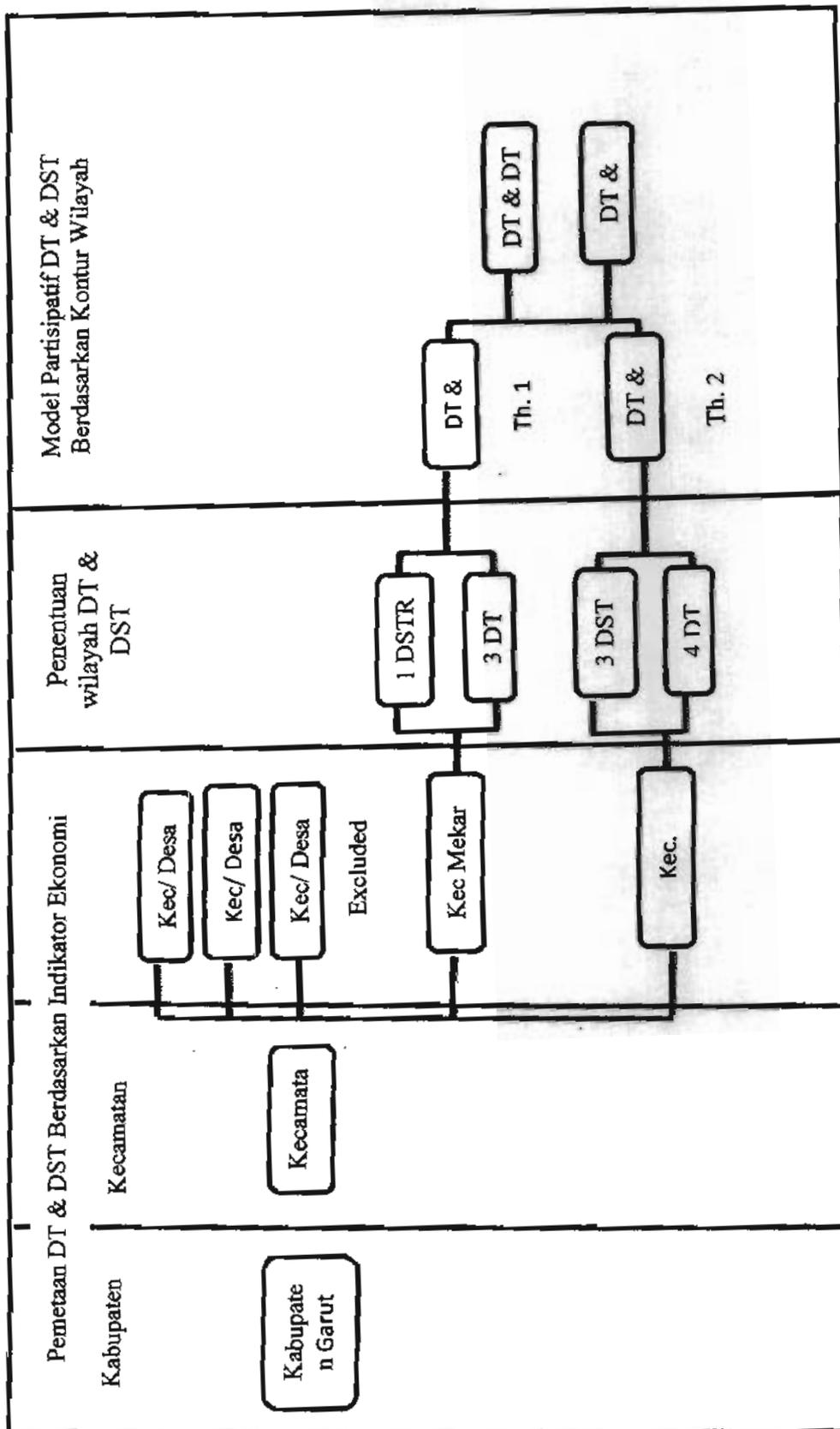
6	Menentukan wilayah desa tertinggal berdasarkan indikator ekonomi yang dapat dijadikan sebagai model analisis pemberdayaan masyarakat miskin secara mandiri maupun partisipatif melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat.	Penentuan Wilayah desa tertinggal berdasarkan indikator ekonomi yang dapat dijadikan sebagai model analisis
7a	Melakukan pemetaan kemiskinan berdasarkan kontur wilayah (tingkat desa) dengan indikator sosial di Kabupaten Garut	Pemetaan kemiskinan berdasarkan wilayah (tingkat desa) dengan indikator sosial
7b	Melakukan survey kemiskinan dengan indikator sosial di desa pegunungan	Analisis kemiskinan dengan indikator sosial di wilayah pegunungan
7b	Melakukan survey kemiskinan dengan indikator social di desa pesisir	Analisis kemiskinan dengan indikator sosial di wilayah pesisir
8	Mengukur tingkat kemandirian dan partisipatif masyarakat untuk dapat membangun suatu lembaga yang terstruktur untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonominya, yaitu lembaga keuangan mikro yang didirikan secara swadaya berdasarkan kebutuhan masyarakat.	Hasil pengukuran tingkat kemandirian dan partisipatif masyarakat untuk membangun lembaga keuangan mikro yang terstruktur
9	Menganalisis secara teoretis maupun empiris pemberdayaan masyarakat miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat.	Hasil analisis secara teoretis maupun empiris pemberdayaan masyarakat miskin melalui Lembaga Keuangan Mikro

10	Mendesain model percontohan di desa tertinggal dan miskin perdesaan berupa model penguatan Lembaga Keuangan Mikro yang terintegrasi dan <i>sustainable</i> untuk menanggulangi kemiskinan melalui prinsip kemandirian dan partisipatif.	Model percontohan di desa tertinggal dan miskin perdesaan berupa model penguatan Lembaga Keuangan Mikro yang terintegrasi dan <i>sustainable</i> untuk menanggulangi kemiskinan melalui prinsip kemandirian dan partisipatif.
----	---	---

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, di mana pada tahap pertama penelitian sudah sampai pada tahap 1-6. Pada penelitian tahap kedua ini maka penelitian lebih memfokuskan pada langkah 7a dan 7b yaitu pemetaan kemiskinan berdasarkan indikator social di wilayah pegunungan.

4.4 Kerangka Wilayah

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 403 desa, 21 kelurahan. Berdasarkan katagorisasi, desa dibagi empat katagori yaitu 6 desa sangat maju, 211 desa manju, 168 desa tertinggal dan 39 desa sangat tertinggal. Dari hasil pengamatan lebih lanjut ternyata ada tiga kecamatan yang memiliki desa dengan katagori seluruhnya tertinggal dan sangat tertinggal yaitu Desa Pakanjen, Desa Mekarmukti dan Desa Telegong. Di Desa Pakanjen ada 12 desa di mana 3 desa terkatagori sangat tertinggal, 8 desa tertinggal dan 1 desa maju, Sementara Desa Mekarmukti terdiri 4 desa di mana 1 desa sangat tertinggal dan 3 desa tertinggal. Desa Talegong terdiri atas 7 desa di mana 3 desa sangat tertinggal dan empat desa tertinggal. Berdasarkan pengamatan, penelitian ini hanya memfokuskan pada kecamatan Telegong di mana seluruh desanya terkatagori tertinggal dan sangat tertinggal.



Gambar 4.1 Kerangka Wilayah

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemetaan Kemiskinan Sosial Berdasarkan Kontur Wilayah

Pada bagian ini akan dipaparkan terkait pemetaan kemiskinan secara sosial berdasarkan kontur wilayah yaitu wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Dari hasil identifikasi di lapangan dan penelusuran data sekunder ternyata Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti adalah dua wilayah di Kabupaten Garut yang terkatagori sangat tertinggal.

Indikator kemiskinan secara sosial dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dibuat oleh BPS yaitu ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterasingan / keterpencilan, korban bencana alam dan sosial serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berikut pemamaparan lengkapnya.

5.1.1 Kemiskinan Sosial di Kecamatan Talegong (Wilayah Pegunungan)

Dari hasil pengamatan di lapangan, salah satu penyebab kemiskinan secara sosial di Kecamatan Talegong adalah masalah keterpencilan. Kecamatan ini terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Selaawi, Desa Sukamaju, Desa Sukamulya, Desa Mekarmulya, Desa Mekarmukti, Desa Sukalaksana dan Desa Mekarwangi. Kecamatan Talegong berada di wilayah selata Kabupaten Garut Jarak dari Kabupaten Garut ke Kecamatan Talegong adalah 108,4 KM dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung khususnya Desa Cukul Kecamatan Pangalengan. Jarak yang sangat jauh dengan kota kabupaten serta kontur wilayah yang berbukit-bukit dengan jenis tanah yang sangat gembur menyebabkan wilayah ini sangat rawan terhadap bencana longsor. Setiap kali hujan dapat dipastikan terjadi longsor di wilayah ini. Sepanjang jalur menuju Kecamatan Talegong ada 14 titik longsor. Setiap kali longsong hampir separuh badan jalan tertimpa material longsor sehingga kendaraan yang keluar masuk wilayah ini hanya satu jalur. Kondisi jalan di wilayah Kecamatan Telegong sudah beraspal namun kondisinya banyak berlubang. Mudahnya jalan rusak karena kontur jalan yang miring dengan tingkat kecuraman yang sangat tajam

sehingga kontur jalan menjadi tidak stabil dan mudah berlubang. Efeknya, akses ke wilayah yang bersangkutan semakin sulit dan lama.

Faktor sosial lainnya penyebab kemiskinan di Kecamatan Talegong adalah keterasingan. Ada tiga wilayah desa yang posisinya sangat sulit terjangkau. Ketiga desa tersebut adalah Desa Salaawi, Desa Sukamaju dan Desa Sukamulya. Ketiga desa ini berstatus desa sangat tertinggal. Posisi ketiga desa ini berada di balik bukit, sehingga untuk menjangkau desa-desa tersebut sangat sulit. Efeknya berbagai infrastruktur untuk kemajuan desa sulit untuk diadakan. Berbagai kebutuhan hidup masyarakat juga sulit untuk dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat ketiga desa tersebut memanfaatkan perbukitan dari gunung yang melingkupi wilayahnya. Efeknya, gunung menjadi gundul dan masyarakat kesulitan akses air bersih baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kebutuhan pertanian. Desa yang paling terpencil yaitu Desa Sukamulya yang terdiri dari 6 kampung dan Desa Sukalaksana ada satu dusun yang sangat terpencil yaitu Dusun Cihanjuang.

Tabel 5.1 Wilayah/Komunitas Terpencil di Kecamatan Talegong Tahun 2016

Desa	Wilayah Terpencil
Selaawi	-
Sukamaju	-
Sukamulya	Kp. Datarkupa 01/06 Kp. Ciranca 04/07 Kp. Cilipung Kompak 05/03 Kp. Pasir Tando 05/07 Kp. Pasir Hayam 04/06 Kp. Pasir Hirung 02/05
Mekarmulya	-
Mekarmukti	-
Sukalaksana	Dusun Cihanjuang
Mekarwangi	-

Sumber: Dokumen Kecamatan Talegong, 2016

Di Kecamatan Talegong, masyarakatnya banyak menderita cacat fisik dan cacat mental. Cacat fisik yang banyak diderita masyarakat Kecamatan Talegong adalah Tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna aksara, tuna daksa, lumpuh dan sumbung. Jumlahnya mencapai 274 orang. Sedangkan penderita cata metal yaitu

idiot dan stress jumlahnya mencapai 27 orang pada tahun 2016. Tingginya angka cacat fisik dan mental merupakan penyebab kemiskinan secara social, karena orang-orang seperti ini tidak dapat menolong dirinya sendiri. Mereka tidak bisa bekerja karena secara fisik mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendatangkan uang secara memadai untuk hidup layak. Kelompok ini sepenuhnya menggantungkan hidup pada pihak lain, sehingga menjadi beban social bagi lingkungannya. Tingkat buta huruf terbanyak di desa Mekarmulya jumlahnya mencapai 81 orang. Sementara di desa lainnya banyak penderita tuna netra, tuna wicara dan tuna rungu. Tingginya angka difable di Kecamatan Talegong dimungkinkan karena rendahnya gizi pada saat ibu hamil, yang berefek pada tingginya kecacatan di wilayah kecamatan ini.

Tabel 5.2 Jumlah Difabel di Kecamatan Talegong Tahun 2016

Desa	Cacat Fisik							Cacat Mental	
	Tuna Netra	Tuna Wicara	Tuna Rungu	Tuna Aksara	Tuna Daksa	Lumpuh	Sumbing	Idiot	Stress
Selaawi	4	1	7	0	0	0	0	2	1
Sukamaju	13	10	5	0	6	0	1	0	0
Sukamulya	4	6	3	0	10	3	1	3	3
Mekarmulya	1	3	43	81	2	2	2	4	0
Mekarmukti	3	6	11	0	1	0	3	3	3
Sukalaksana	17	2	0	0	12	0	0	2	1
Mekarwangi	3	3	3	0	0	1	1	0	5
Total	45	31	72	81	31	6	8	14	13

Sumber: Dokumen Perdesa di Kecamatan Talegong, 2016

Di kecamatan Talegong banyak berkembang pula penyakit kronis di mana jumlahnya mencapai 243 orang. Tingginya angka kesakitan ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, sehingga masyarakat tidak mengatur pola hidupnya, pola makannya serta asupan gizinya. Tingginya angka kesakitan berefek pada rendahnya tingkat produktivitas dan pendapatan. Dengan demikian, banyak masyarakat yang memiliki ketidakmampuan ekonomi sosial yang berefek pada tingginya angka kemiskinan yaitu kelompok masyarakat prasejahtera dan sejahtera 1 dan 2

Tabel 5.3 Jumlah Pertahapan Sejahtera per desa di Kecamatan Talegong Tahun 2016

Desa	Prasejahtera (KK)	Sejahtera 1 (KK)	Sejahtera 2 dan 3 (KK)	Total (KK)
Selaawi	538	464	283	1.285
Sukamaju	830	639	358	1.827
Sukamulya	767	703	404	1.874
Mekarmulya	510	442	186	1.138
Mekarmukti	597	370	278	1.245
Sukalaksana	746	686	148	1.580
Mekarwangi	312	327	148	787
Total	4.300	3.631	1.805	9.736

Sumber: UPT-KBPP Kecamatan Talegong, 2016

Tahapan kesejahteraan di Kecamatan Talegong pada tabel 5.4 menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih berada pada tahap prasejahtera yakni sekitar 44.16 persen. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa Desa Sukamaju berada pada prasejahtera paling tinggi yakni 830 KK atau sekitar 19.30 persen, sedangkang keluarga yang berada pada tahap sejahtera 1 (satu) yang paling banyak adalah Desa Sukamulya yakni sebesar 703 KK dan keluarga yang berada pada sejahtera 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terbesar adalah Desa Sukamulya sebanyak 404 KK. Jumlah fakir miskin di Kecamatan Talegong mencapai 2.727 orang yang tersebar di tujuh desa

Tabel 5.4 Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Talegong berdasarkan Penerima Program Raskin Tahun 2016

Desa	Jumlah KK
Selaawi	441
Sukamaju	566
Sukamulya	541
Mekarmulya	288
Mekarmukti	208
Sukalaksana	598
Mekarwangi	145
Total	2.727

Sumber: Dokumen Kecamatan Talegong, 2016

Pada Tabel 5.2 dapat dilihat desa dengan jumlah keluarga fakir miskin paling banyak adalah Desa Sukalaksana dengan jumlah 598 KK dari 2.727 KK atau sekitar 22 persen, sedangkan desa yang jumlah keluarga fakir miskin paling rendah terdapat pada Desa Mekarwangi dengan total 145 KK. Banyaknya jumlah fakir miskin ini salah satunya di sebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan perkapita masyarakat di Kecamatan Talegong Tahun 2016 berkisar antara Rp. 500.000- 600.000 rupiah.

Di Kecamatan Talegong tidak ditemukan kemiskinan social karena buruknya perilaku masyarakat yang berefek pada berkembangnya penyakit menular seperti HIV. Selain itu, di Desa ini tidak ditemukan wanita tuna susila maupun pekerja seks komersial.

Tabel 5.5. Tingkat di Kecamatan Talegong Tahun 2016

No	Jenis Penyakit	Jumlah (Jiwa)
1	Warga Pengguna Narkoba	0
2	Penderita Tertular HIV	0
3	Penderita Penyakit Kronis	243
4	Penderita Penyakit Keganasan	1
Total		244

Sumber: Dokumen Puskesmas Kecamatan Talegong, 2016

Di Kecamatan Talegong ditemukan banyak sumber air bersih yaitu mata air, sumur galian dan sungai dengan status cukup baik dan baik, meskipun di beberapa desa yaitu Desa Salaawi, Desa Mekarmulya dan Desa Sukalaksana dalam keadaan rusak. Rusaknya gunung yang melingkupi tiga desa yaitu Desa Salaawi, Desa Mekarmulya dan Desa Sukalaksana menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses air bersih. Efeknya, masyarakat miskin secara social di ketiga desa ini, terutama desa Sukalaksana.

Tabel 5.6 Akses Air Bersih Kecamatan Talegong Tahun 2016

Desa	Jenis/ Sumber	Jumlah (Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
Selaawi	a. Mata Air	47	650	Rusak
	b. Sumur Galian	655	655	Baik
	c. Sungai	1	Publik	Sedang
Sukamaju	a. Sumur Galian	36	36	Baik
	b. Tangki Air Bersih	11	Publik	Sedang
	c. Embung	23	Publik	Sedang
	d. Mata Air	43	725	Baik
Sukamulya	a. Mata Air	48	120	Baik
	b. Sumur Gali	178 5	178 240	Sedang Sedang
	c. Sungai			
Mekarmulya	a. Mata Air	40	165	Sedang
	b. Sumur	25	43	Baik
	Gali	9	995	Rusak

Desa	Jenis/ Sumber	Jumlah (Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
	c. Sungai			
Mekarmukti	a. Mata Air	285	1.711	Baik
	b. Sumur	160	875	Sedang
	Gali	321	753	Baik
	c. Sumur Serapan Air Rumah			
	Tangga d. Sungai	17	1.321	Sedang
Sukalaksana	a. PAM	-	99	Baik
	b. Sumur	5	5	buruk
	Gali	-	170	Buruk
	c. Fasilitas Air Bersama	-	100	Buruk
	d. Sungai			
Mekarwangi	a. Mata air	-	36	Baik
	b. Sumur	45	45	Baik
	Gali	3	3	Baik
	c. Sumur Pompa	-	698	Sedang
	d. Fasilitas Air Bersama			

Sumber: Dokumen Perdesa di Kecamatan Talegong, 2016

5.1.2 Kemiskinan Sosial di Kecamatan Mekarmukti (Wilayah Pesisir)

Kecamatan Mekarmukti adalah salah satu wilayah pesisir yang terkatagori miskin. Secara social kemiskinan di wilayah Kecamatan Mekarmukti karena lokasi kecamatan ini yang jauh dari wilayah Kabupaten Garut. Jarak antara Kabupaten Garut dengan Kecamatan Mekarmukti kurang lebih 49,9 km. Kecamatan Mekarmukti berada di tepi pantai, di mana ada lima desa yang berada di bawah pemerintahan kecamatan Mekarmukti. Dua desa berada di wilayah pegunungan dan tiga desa berada di wilayah pesisir pantai, namun demikian sebagian besar masyarakat Kecamatan Mekarmukti sebagai buruh tani dan hanya sedikit nelayan. Dari sisi keterpencilan, wilayah Kecamatan Mekarmukti sama terpencilnya dengan Kecamatan Talegong. Jalan menuju Kecamatan Mekarmukti harus melewati bukit-bukit berinding tinggi yang sangat rawan terhadap longsor ketika turun hujan. Jarak ditempuh dari Kecamatan Talegong menuju Kecamatan

Mekarmukti memakan waktu kurang lebih 2 jam. Akses jalan menuju kecamatan ini baik, karena jalan ini merupakan jalan provinsi. Namun demikian, jalan menuju Kecamatan Mekarmukti dilalui oleh pegunungan sehingga ketika hujan deras seringkali jalan terputus menuju kecamatan ini. Di Kecamatan ini ada tiga desa yang letaknya sulit diakses terutama wilayah yang mengarah ke wilayah pegunungan. Desa-desa ini berada di balik perbukitan yang berjauhan satu dengan yang lainnya serta jalan yang tidak layak untuk dilalui. Jalan di kampung-kampung tersebut masih berupa pemadatan bahkan ada yang berupa jalan tanah. Di dusun-dusun tersebut belum ada aliran listrik. Selain itu, letak kampung-kampung tersebut jauh dari perkampungan yang lain. Wilayah terisolasi lainnya terdapat di Desa Cijayana tepatnya di Kampung Soka RT/RW 07/04 dan Kampung Datar Muntang RT/RW 03/06 Dusun 02.

Tabel 5.7 Wilayah/Komunitas Terpencil di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

Desa	Wilayah Terpencil
Mekarmukti	-
Mekarsari	Kp. Hegarmanah Rw 02 Dusun 02 Kp. Bojong Kaso Rw 05 Dusun 02 Kp. Pangawaren RW 04
Cijayana	Kp. Soka RT/RW 07/04
Jagabaya	Kp. Datar Muntang RT/RW 03/06 Dusun 02
Karangwangi	-

Sumber: Dokumen Perdesa Kecamatan Mekarmukti, 2016

Dilihat dari ketidakmampuan social ekonomi, di Kecamatan Mekarmukti ada banyak kepala keluarga tergolong miskin. BPS mencatat jumlah keluarga pra sejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2 jumlahnya mencapai 5.104 KK yang tersebar di lima desa yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan Mekarmukti.

Tabel 5.8 Jumlah Pertahapan Sejahtera per desa di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

No	Desa	Prasejahtera	Sejahtera 1	Sejahtera II dan III+
1	Mekarmukti	180	407	408
2	Mekarsari	179	223	333
3	Cijayana	169	523	307
4	Jagabaya	409	413	607
5	Karangwangi	38	452	456
Total		975	2.018	2.111

Sumber: UPTKB & PP Kec. Mekarmukti, 2016

Tahapan kesejahteraan di Kecamatan Mekarmukti menunjukkan bahwa Desa Jagabaya berada pada prasejahtera paling tinggi yakni 409 KK, sedangkan keluarga yang berada pada tahap sejahtera 1 (satu) yang paling banyak adalah Desa Cijayana yakni sebesar 523 KK dan keluarga yang berada pada sejahtera 2 (dua) dan 3 (tiga) yang terbesar adalah Desa Jagabaya sebanyak 607 KK. Kecamatan Mekarmukti sebagian besar penduduknya berada pada tahap sejahtera II dan III yakni sebesar 2.111 KK dari total 5.104 KK atau sebesar 41.36 persen. Adapun jumlah fakir miskin di Kecamatan Mekarmukti jumlahnya mencapai 1.751 kepala keluarga.

Tabel 5.9 Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

No	Desa	Jumlah KK
1	Mekarmukti	441
2	Mekarsari	402
3	Cijayana	312
4	Jagabaya	253
5	Karangwangi	434
Total		1.751

Sumber: Dokumen Perdesa Kecamatan Mekarmukti, 2016

Sebagai petani, masyarakat Kecamatan Mekarmukti bukanlah sebagai pemilik tetapi hanya sebagai buruh dan penggarap. Efeknya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan secara layak yang akan berefek pada

kemampuan belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan Mekarmukti adalah SD yang disebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah dari masyarakat. Meskipun jumlah sekolah banyak di wilayah ini, namun hanya sedikit masyarakat yang berminat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Di Kecamatan Mekarmukti, masyarakatnya banyak menderita cacat fisik dan cacat mental. Cacat fisik yang banyak diderita masyarakat Kecamatan Mekarmukti adalah Tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, tuna aksara, tuna daksa, lumpuh dan sumbung. Jumlahnya mencapai 49 orang. Sedangkan penderita cata metal yaitu idiot dan stress jumlahnya mencapai 18orang pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Talegong, Cacat fisik dan mental di wilayah ini jauh lebih kecil.

Tabel 5.9 Jumlah Warga Difable di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

Desa	Cacat Fisik						Cacat Mental	
	Tuna Netra	Tuna Wicara	Tuna Rungu	Cacat Kulit	Tuna Daksa	Lumpuh	Idiot	Stress
Mekarmukti	0	1	2	0	0	0	2	1
Mekarsari	0	1	1	0	1	0	1	0
Cijayana	1	1	1	0	0	1	2	2
Jagabaya	1	3	1	1	2	1	2	3
Karangwangi	5	7	12	2	0	3	2	3
Total	8	13	17	3	3	5	9	9

Sumber: Dokumen Perdesa Kecamatan Mekarmukti, 2016

Namun demikian, bukan berarti tingkat kemiskinannya secara social lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Angka kesakitan di wlayah ini jauh lebih besar dibandingkan Kecamatan Talegong.

Tabel 5.10 Penyakit Kronis di Kecamatan Mekarmukti Tahun 2016

No	Jenis Penyakit	Jumlah (Kunjungan)
1	Warga Pengguna Narkoba	0
2	Penderita Tertular HIV	0
3	Penderita Penyakit Kronis	
	a. Hipertensi	1.806
	b. Diabetes	189
	c. TB Paru	865
	d. Asma	102
Total		2.962

Sumber: Dokumen Puskesmas Kecamatan Mekarmukti, 2016

Di kecamatan Mekarmukti banyak berkembang penyakit kronis di mana jumlahnya mencapai 2962 orang. Penyakit yang banyak berkembang di wilayah ini adalah hipertensi di mana jumlahnya mencapai 1.806 orang, TB paru-paru 865 orang. Tingginya angka kesakitan tersebut dikarenakan pola hidup yang kurang sehat, lingkungan yang kurang bersih menyebabkan berbagai kuman berkembang di wilayah ini.

Di Kecamatan Mekarmukti tidak ditemukan kemiskinan social karena buruknya perilaku masyarakat seperti HIV, Narkoba, wanita tuna susila dan lainnya. Terkait akses air bersih, Masyarakat Kecamatan Mekarmukti tidak menemukan kesulitan untuk akses air bersih. Banyak sumber mata air maupun air tanah di wilayah ini.

Kecamatan Mekarmukti, 2016

Sama halnya dengan Kecamatan Talegong akses terhadap air bersih di Kecamatan Mekarmukti sangat mudah, hal ini dilihat dari banyaknya mata air, sumur dan muara sungai yang banyak sebab kecamatan ini terdiri dari perbukitan dan daerah pesisir sehingga akses terhadap air sangat mudah. Akan tetapi masih banyak sumur warga yang airnya masih keruh tetapi tidak berbau, sehingga

masyarakat masih memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari yakni masak dan mandi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Akses Air Bersih di Kecamatan Mekarmukti

Desa	Jenis/ Sumber	Jumlah (Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
Mekarmukti	a. Mata Air	5	250	Sedang
	b. Sumur Gali	478	478	Baik
Mekarsari	Mata air	6	158	Sedang
	b. Sumur Gali	269	269	Sedang
	c. Sumur Pompa	213	213	Baik
	d. Pipa	6	178	Baik
Cijayana	a. Mata Air	4	Publik	Baik
	b. Sumur Gali	360	360	Baik
Jagabaya	a. Mata Air	5	275	Rusak
	b. Sumur Gali	150	150	Baik
	c. Sungai	1	542	Baik
Karangwangi	a. Mata air	10	60	Baik
	b. Sumur Gali	401	401	Baik
	c. Sumur Pompa	310	310	Baik
	d. Pipa	8	295	Baik
	e. Embung	2	90	Baik
	f. Depot Isi Ulang	4	405	Baik

Sumber: Dokumen Perdesa Kecamatan Mekarmukti, 2016

Prasarana air bersih sangat banyak dan mudah diakses, hal ini dilihat karena kondisi wilayah yang berada dipegunungan dan ada beberapa desa yang dekat dengan bantaran sungai. Akan tetapi ada beberapa desa yang kondisi airnya rusak seperti yang terdapat di Desa Jagabaya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa kesimpulan terkait sumber penyebab kemiskinan di wilayah pegunungan dan di wilayah pesisir Kabupaten Garut yaitu:

1. Sumber penyebab utama kemiskinan secara social di wilayah pegunungan Kabupaten Garut dengan mengambil sampel Kecamatan Talegong adalah keterpencilan wilayah yang disebabkan karena jalan untuk menuju wilayah ini dibatasi oleh dinding-dinding bukit yang sangat rawan akan longsor dengan kontur tanah yang sangat gembut. Efeknya pada saat hujan, ada banyak titik longsor di wilayah ini yang menyebabkan desa-desa yang ada di bawah pemerintahan kecamatan Talegong terputus dari hubunga dengan kecamatan sekitarnya. Selain itu, di wilayah ini ada tiga desa yang letaknya sangat terpencil sehingga menyulutkan masyarakat untuk dapat mengakses sumber daya secara layak. Kemiskinan di wilayah ini semakin parah karena masyarakat memanfaatkan gunung dan bukitnya sebagai tempat bercocok tanam. Gunung menjadi gundul yang berakibat pada sulitnya masyarakat mendapatkan air baik untuk pertanian maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, di wilayah ini banyak masyarakat menderita cacat fisik dan cacat mental yang mengakibatkan mereka sangat bergantung secara social pada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Di kecamatan ini tidak ada masalah perilaku social yang menyimpang sehingga masyarakat terjebak pada masalah narkoba, HIV maupun PSK.
2. Sumber utama penyebab kemiskinan social di wilayah Kecamatan Mekarmukti adalah masalah keterpencilan dan keterasingan. Jarak yang jauh dari pusat kota Kabupaten serta akses jalan yang sulit serta rawan longsor menyebabkan Kecamatan Mekarmukti menjad terpencil secara social. Selain itu ada dua wilayah desa dari lima desa di Kecamatan Mekarmukti dengan status sangat terpencil. Akses jalan yang tidak memadai serta jaringan listrik yang belum

masuk menyebabkan masyarakat tidak dapat mengoptimalkan potensi ekonominya. Mereka hanya mengolah tani secara subsisten yaitu bertani hanya untuk memenuhi konsumsi pribadi. Selain itu, di wilayah ini berkembang penyakit degenetratif sehingga secara social masyarakat yang sakit ini tidak bisa secara optimal memanfaatkan kemampuannya Dengan demikian, secara social kelompok ini menjadi kurangberdaya dalam kehidupan sosialnya. Angka cacat fisik dan mental jauh lebih sedikit di kecamatan ini dibandingkan Kecamatan Talegong. Di Kecamatan ini tidak ditemukan penyakit social seperti pencandu narkoba, HIV maupun seks komersial.

6.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih banyak untuk wilayah-wilayah yang rawan akan bencana, sehingga pada saat terjadi bencana maka keterisoliran wilayah kena bencana dengan dunia luar tidak terlalu lama.
2. Perlu adanya pengembangan indicator kemiskinan secara social seperti indicator angka kesakitan. Indikator ini menjadi sangat penting karena ketika orang sakit maka ia menjadi tidak produktif secara ekonomi dan juga tidak dapat berkontribusi banyak dalam kehidupan social, Efeknya ia akan menarik diri dan menjadi terasing dari lingkungan social dan ia menjadi miskin (karena tidak bisa akses terhadap aktivitas produktif dan informasi dari masyarakat).

Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut

¹Tasya Aspiranti, ²Ima Amaliah

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung
email : ¹ad_tasya@yahoo.com; ²amalia.razi@gmail.com

Abstract. Poverty is a multidimensional problem because poverty is not only an economic problem but also a social and political issue. The purpose of this study is to identify poverty based on social factors in the mountainous region Garut regency. The research type is quantitative descriptive with field survey method. The sample of the research area is Talegong Sub-district which has 7 villages with the status of the backward village. The results show that social factors that cause high poverty in this region because of the contours of the region are very vulnerable to landslides with very difficult road access that is a small road, perforated with a very sharp turn. Along the road to the village found many landslide points. In addition, qualified human resources prefer to live in cities so that people in low-educated villages have an impact on the low quality of life and health as reflected in the development of chronic diseases in this region.

Keywords: Poverty, Social Factors and Mountainous Region

Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi tetapi juga masalah social bahkan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemiskinan berdasarkan faktor social di wilayah pegunungan Kabupaten Garut. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan. Sampel daerah penelitian adalah Kecamatan Talegong yang terdiri dari 7 desa dengan status desa tertinggal. Hasil dari identifikasi terpotret bahwa faktor social yang menyebabkan tingginya kemiskinan di wilayah ini karena kontur wilayah yang sangat rawan terhadap longsor dengan akses jalan yang sangat sulit yaitu jalan kecil, berhubung dengan kelokan yang sangat tajam. Di sepanjang jalan menuju desa ditemukan banyak titik longsor. Selain itu, SDM yang berkualitas lebih senang tinggal di kota sehingga masyarakat yang ada di desa tetap berpendidikan rendah yang berdampak pada rendah kualitas hidup dan kesehatan yang tercermin dari berkembangnya penyakit kronis di wilayah ini.

Kata Kunci: Kemiskinan, Faktor Sosial, Wilayah Pegunungan

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang belakangan intens dibahas oleh berbagai pihak terkait, terutama pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai penentu kebijakan. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kebutuhan hidup minimal adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Sedangkan BPS menggunakan garis kemiskinan pemerintah sebesar Rp. 220.000 per kapita per bulan (Hermawan, 2012; 139). Khususnya di Jawa Barat, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih terkatagori tinggi. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sampai bulan September 2014 adalah sebanyak 4.238.960 orang atau 9,18 % dari jumlah penduduk Jawa Barat. Proporsi ini menunjukkan bahwa angka

kemiskinan di Jawa Barat cukup tinggi. Fenomena lainnya memperlihatkan bahwa di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin mencapai 10,88 % sedangkan di daerah perkotaan sebesar 8,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan di Jawa Barat. Dari tahun 2007-2010 angka kemiskinan di perdesaan secara berurutan tercatat 2,8 juta orang, 2,71 orang, 2,45 juta orang dan 2,42 juta orang. Jumlah tersebut lebih dari separuh jumlah penduduk miskin (Sundaya dan Muhandi, 2011; 57).

Dari hasil penelitian Aspiranti, Ima Amaliah, Pupung Purnamasari dan Sri Suwarsi (2016) menemukan Kabupaten Garut merupakan wilayah termiskin setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut jika dilihat dari pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan serta banyaknya protein yang dikonsumsi masyarakat nampak Kabupaten Garut memiliki tingkat pengeluaran yang paling kecil. Sementara jika dilihat dari luas lantai per kapita, Kabupaten Garut memiliki luas lantai paling sempit. Dari aspek kepemilikan sarana prasarana telekomunikasi Kabupaten Garut pun belum memiliki akses yang kurang memadai terhadap teknologi informasi (telpon rumah maupun komputer).

Meskipun selama 30 tahun terakhir, Kabupaten Garut melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, strategi maupun kebijakan khusus, seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga (Prokesos KUBE), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jaring Pengaman Sosial (JPS), P2KP, PNPM Mandiri, dan sebagainya, namun, berbagai kebijakan program tersebut banyak mengalami hambatan dan kekurangan pada tataran implementasinya. Oleh karenanya, angka kemiskinan tetap tinggi di Kabupaten Garut.

Selama ini, potret kemiskinan lebih banyak terfokus pada aspek ekonomi saja, padahal kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi yaitu menyangkut pula masalah sosial, politik, kelembagaan dan lain sebagainya. Dari hasil identifikasi di lapangan ternyata ada dua kecamatan yang memiliki wilayah tertinggal dan sangat tertinggal. Kedua kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Talegong dan Kecamatan Mekarmukti. Kecamatan Talegong merupakan salah satu kecamatan di wilayah pegunungan yang sangat rentan terhadap bencana alam serta sering terisolir dari hubungan dengan wilayah luar. Menjadi sangat menarik untuk diteliti, apakah betul Kecamatan Talegong terkatagori miskin karena faktor social? Jika benar, apa faktor yang cukup dominan yang membuat Kecamatan Talegong terkatagori wilayah sangat tertinggal?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS dan publikasi Desa dan kecamatan yang diamati. Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa yang berada di wilayah Kecamatan Talegong.

3. Hasil dan Pembahasan

Ada banyak indikator untuk melihat kemiskinan dari faktor social di Kecamatan Talegong. Dengan merujuk pada definisi BPS dalam Zulkifli (2013) maka indikator yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kemiskianan dari aspek social di wilayah

pegunungan Kecamatan Talegong adalah banyaknya fakir miskin, buruh tani, rumah tidak layak huni, keluarga per tahapan sejahtera, kondisi kesehatan, jumlah penderita difabel, wilayah atau komunitas terpencil dan terisolir, tingkat pendidikan masyarakat dan akses terhadap air bersih.

Dari data Potensi Kecamatan Talegong, desa yang memiliki jumlah fakir miskin terbanyak adalah Desa Sukalaksana dengan jumlah KK sebanyak 598 atau 22 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Talegong. Sedangkan desa yang jumlah keluarga fakir miskin paling rendah yaitu Desa Mekarwangi dengan total 145 KK. Banyaknya jumlah fakir miskin ini salah satunya disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan perkapita masyarakat di Kecamatan Talegong Tahun 2016 berkisar antara Rp. 500.000- Rp. 600.000 per bulan (kurang dari \$2 per hari).

Sebagian besar penduduk Kecamatan Talegong sebagai buruh tani meskipun ada beberapa desa yang mayoritas penduduknya bertani sehingga dapat dilihat potensi unggulan desa ini adalah padi. Petani di Kecamatan Talegong masih bersifat tradisional,. Artinya penduduk belum mampu memanfaatkan lahan pertanian dengan optimal. Misalnya petani hanya menanam padi saja, belum mampu mengelola lahan secara optimal. Penyebabnya petani masih bersifat tradisional karena ketersediaan lahan yang sedikit, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi lahan yang ada di setiap desa di Kecamatan Talegong.

Adapun jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Talegong paling banyak terdapat di Desa Sukalaksana dengan jumlah 804 KK atau sekitar 55.18 dari jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Talegong. Tingginya angka tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, sehingga kemampuan mengakses sarana dan prasarana dasar rendah karena daya beli yang rendah pula. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni paling rendah terdapat di Desa Mekarmukti dengan jumlah 20 KK. Karakteristik rumah di Kecamatan Talegong masih banyak yang panggung, terutama di desa-desa yang jauh dari kecamatan.

Dilihat dari tahapan kesejahteraan, masyarakat di kecamatan Talegong masih berada pada tahap prasejahtera yakni sekitar 44.16 persen. Hal itu berarti masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Desa di Kecamatan Talegong yang memiliki keluarga prasejahtera terbanyak adalah Desa Sukamaju dengan jumlah 830 KK atau sekitar 19.30 persen, sedangkan Desa yang memiliki tahap sejahtera 1 (satu) paling banyak adalah Desa Sukamulya yaitu 703 KK dan Desa yang memiliki kelompok keluarga katagori sejahtera 2 (dua) dan 3 (tiga) terbesar adalah Desa Sukamulya sebanyak 404 KK.

Kecamatan talegong terbebas dari pengguna narkoba serta penderita HIV. Namun di Kecamatan ini ada 243 orang warga yang terserang penyakit kronis berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Kecamatan Talegong serta satu orang warga yang mengidap penyakit keganasan. Penyakit kronis ini terdiri dari penyakit jantung, hipertensi dan asma. Tingginya penderita penyakit kronis ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan asupan gizi yang aman bagi tubuh. Bagi masyarakat Kecamatan Talegong memakan makanan yang dihangatkan berulang-ulang, menggunakan minyak jelantah yang telah hitam, makan makanan tinggi garam, gula dan kalori merupakan hal biasa. Dengan demikian, sangat wajar jika angka kesakitan penyakit kronis sangat tinggi di Kecamatan Talegong.

Tingkat kecatatan fisik (*difabel*) maupun cacat mental di Kecamatan Talegong masih tergolong tinggi. Cacat fisik yang paling banyak diderita penduduk adalah tuna rungu, diikuti oleh tuna netra, tuna wicara dan tuna daksa. Adapun cacat mental paling banyak diderita masyarakat adalah idiot dan stress. Tingginya angka difabel di

kecamatan ini dikarenakan rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang banyak dalam pemenuhan gizi yang baik serta asupan vitamin dan mineral yang memadai pada saat hamil serta sulitnya akses kesehatan yang disebabkan keterpencilan wilayah kecamatan Talegong. Ketersediaan layanan kesehatan merupakan salah satu cara untuk memutus tingkat kemiskinan di desa, karena jika masyarakatnya sehat maka masyarakat akan bekerja lebih produktif yang berefek pada naiknya pendapatan dan kemampuan belanja masyarakat. Hasil akhirnya kemiskinan di desa dapat ditekan lebih rendah.

Jarak antar desa dapat menjadi penyebab kemiskinan secara social di Kecamatan Talegong karena jarak antar satu desa dengan desa lainnya sulit dijangkau meskipun jaraknya tidak terlalu berjauhan. Jalan yang merupakan salah satu alat akses dalam kondisi rusak parah. Desa terdekat dari ibu kota kecamatan yaitu Desa Sukalaksana dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit dari kecamatan. Kondisi jalan menuju desa ini sebagian besar telah di aspal, namun keadaannya sudah rusak dan berlubang. Lebar jalannya hanya bias dilewati oleh satu mobil saja. Di sepanjang jalan banyak ditemui bekas material longsor, sekitar lebih dari 14 titik. Selanjutnya, jarak antara desa Sukalaksana dengan Desa Sukamaju dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Perjalanan menuju desa ini melewati jalanan yang kondisinya tidak baik dan berlubang, serta beberapa titik longsor. Untuk mencapai desa ini, dapat ditempuh melalui jalan provinsi yang kondisinya baik, namun setelah memasuki gerbang desa, kembali memasuki jalan yang kondisinya berlubang dan tidak baik dan tidak tidak ditemukan bekas longSORAN. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagian besar akses jalan di Kecamatan Talegong dalam kondisi rusak dengan kontur jalan yang masih bersifat bebatuan dan pemadatan. Sulitnya akses jalan ini sebagai salah satu penyebab di kecamatan ini masih ada beberapa wilayah atau lokasi yang terpencil. Di Desa Sukamulya terdapat beberapa kampung terpencil karena akses jalan yang masih jauh dari layak. Selain itu, letak kampung-kampung tersebut jauh dari perkampungan lainnya. Wilayah terisolasi lainnya terdapat di Desa Sukalaksana tepatnya di Dusun Cihanjuang. Sama halnya dengan wilayah terisolasi lain, dusun ini pun memiliki akses yang sulit dijangkau karena lokasi yang jauh dan akses jalan yang kondisinya masih pemadatan.

Di Kecamatan Talegong akses terhadap air bersih sangat mudah, banyaknya sumber mata air, sumur dan muara sungai, sebab kecamatan ini terletak di wilayah perbukitan sehingga akses terhadap air sangat mudah. Dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Talegong dapat dikatakan bahwa akses terhadap sumber air bersih dapat dikatan baik. Artinya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan air baik untuk kebutuhan makan, minum, cuci serta untuk pertanian karena kondisi sumber mata air dalam katagori baik dan cukup baik. Meskipun ada beberapa kasus seperti di Desa Salaawi sumber mata air sumur dalam keadaan rusak.

Tabel 1. Akses Air Bersih Kecamatan Talegong Tahun 2016

Desa	Jenis/ Sumber	Jumlah (Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
Selaawi	a. Mata Air	47	650	Rusak
	b. Sumur Galian	655	655	Baik
	c. Sungai	1	Publik	Sedang
Sukamaju	a. Sumur Galian	36	36	Baik
	b. Tangki Air Bersih	11	Publik	Sedang

Desa	Jenis/ Sumber	Jumlah (Unit)	Pemanfaatan (KK)	Kondisi
	c. Embung	23	Publik	Sedang
	d. Mata Air	43	725	Baik
Sukamulya	a. Mata Air	48	120	Baik
	b. Sumur Gali	178	178	Sedang
	c. Sungai	5	240	Sedang
Mekarmulya	a. Mata Air	40	165	Sedang
	b. Sumur Gali	25	43	Baik
	c. Sungai	9	995	Rusak
Mekarmukti	a. Mata Air	285	1.711	Baik
	b. Sumur Gali	160	875	Sedang
	c. Sumur Serapan Air Rumah Tangga	321	753	Baik
	d. Sungai	17	1.321	Sedang
Sukalaksana	a. PAM	-	99	Baik
	b. Sumur Gali	5	5	buruk
	c. Fasilitas Air Bersama	-	170	Buruk
	d. Sungai	-	100	Buruk
Mekarwangi	a. Mata air	-	36	Baik
	b. Sumur Gali	45	45	Baik
	c. Sumur Pompa	3	3	Baik
	d. Fasilitas Air Bersama	-	698	Sedang

Sumber: Dokumen Perdesa di Kecamatan Talegong, 2016

Selain Desa Salaawi, desa lainnya yang memiliki akses terhadap sumber air kurang baik yaitu desa Sukalaksana dan Desa Mekarmulya. Kondisi perairan dan irigasi di Desa Sukalaksana sangatlah tidak bisa diandalkan. Saluran irigasi tidak terpelihara secara baik, padahal saluran irigasi ini sangat penting untuk mengelola tanah pertanian. Efeknya, sawah tidak berfungsi secara optimal karena tidak ada air yang memadai untuk bertanam padi. Selain itu, kondisi gunung yang ada di wilayah Kecamatan Talegong dalam kondisi gundul, sehingga tidak dapat menyimpan air dan berpotensi longsor jika musim hujan tiba.

Di Kecamatan Talegong ini terdapat banyak sekolah mulai dari sekolah dasar, SMP dan SMA yang berlokasi dekat kantor Kecamatan. Anak-anak dari berbagai desa bersekolah di sana, meskipun jarak yang ditempuh jauh dan tidak sedikit dari siswa-siswi yang berjalan kaki menuju sekolah. Setelah lulus sekolah, ada beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengejar gelar S1, bahkan terdapat diantara warga masyarakat Kecamatan Talegong yang melanjutkan hingga S2 dan S3. Warga Kecamatan Talegong yang memiliki pendidikan tinggi umumnya tidak kembali ke kampung halamannya. Mereka lebih senang berkarier di Kota yang memberinya penghasilan tinggi. Efeknya sumber daya manusia yang tertinggal di desa adalah mereka yang memiliki pendidikan rendah dan tidak dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan desanya. SDM yang ada adalah SDM yang tidak dapat bersaing di kota karena keterbatasan pengetahuan dan keahlian, sehingga agar dapat bertahan hidup mereka memilih tinggal di desa. Dengan demikian, SDM yang tersisa di Kecamatan Talegong adalah SDM yang berpendidikan rendah dan berfek pada sulitnya memutus rantai kemiskinan di Kecamatan ini. Padahal SDM yang berkualitas bergantung pada pendidikan dan keahlian dari sumber daya manusia itu sendiri. Jika sumber daya manusia dengan kualitas pendidikan dan keahlian yang tidak kompeten

bekerja pada sector tertentu akan berdampak pada tingkat produktivitas dan peningkatan pendapatan (Jajang dkk. 2013; 202). Naiknya pendapatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membelanjai pengeluarannya, efeknya kemiskinan akan menurun.

Kesimpulan

Dari hasil identifikasi data dapat disimpulkan faktor social penyebab kemiskinan di Kecamatan Talegong sebagai wilayah pegunungan lebih disebabkan karena kontur wilayah perbukitan yang sangat rawan terhadap longsor pada saat musim hujan. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang sempit, berkelok dan berlubang membuat sulitnya akses ke wilayah ini. Sarana sekolah di Kecamatan Talegong cukup banyak, namun keinginan untuk sekolah masih sangat beragam serta masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih senang bekerja di wilayah perkotaan. Efeknya kualitas sumber daya manusia di wilayah desa tetap rendah. Penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi dan asma cukup tinggi di wilayah ini karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pola hidup sehat. Jumlah penduduk difabel seperti cacat fisik yaitu tuna rungu, tuna netra, tuna wicara dan tuna daksa, cacat mental seperti idiot dan stress cukup tinggi di Kecamatan Talegong. Tingginya angka ini dikarenakan kurang asupan makanan bergizi, vitamin dan mineral pada saat seorang ibu hamil.

Daftar pustaka

- Aspiranti, Tasya, Ima Amaliah, Sri Suwarsi, Pupung Purnamasari. (2016). "Pemetaan Wilayah Kemiskinan di Jawa Barat Berdasarkan Indikator Ekonomi," *Laporan Penelitian*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung
- Badan Pusat Statistik. (2014). "Konsep Kemiskinan." Jawa Barat: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2016). "Kecamatan Talegong dalam Angka". Jawa Barat: BPS
- Hermawan, Iwan. (2012). "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 28. No. 2 (Desember). 135-144. Bandung: LPPM Unisba
- Jajang, Asep Saefuddin, I. Wayan Mangku, Hermanto Siregar. (2013). "Analisis Kemiskinan Menggunakan Model Panel Spesial Statik." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vo. 29 No. 2 (Desember). 195-203. Bandung: LPPM Unisba
- Purwadinata, W.J.S.(1997), "Kamus Umum Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka.
- Sundaya, Yuhka dan Muhandi. (2011). "Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin Tanaman Pangan di Jawa Barat: Analisis dan Simulasi Kebijakan." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXVII.NO. 1 (Juni). 57-66. Bandung: LPPM Unisba
- Suyanto, Bagong, 2013, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*, Penerbit Intrans Publishing, Malang.
- Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Zulkifli, Arif. 2013. *Kemiskinan di Indonesia atau Poverty in Indonesia*. Diunggah dari <https://bangazul.com/potret-kemiskinan-di-indonesia/> pada tanggal 22 Agustus 2017



HOME

ABOUT

USER HOME

SEARCH

CURRENT

ARCHIVES

SUBMISSIONS

USER

You are logged in as...

ima_amallah

- My Journals
- My Profile
- Log Out

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

NOTIFICATIONS

- View (70 new)
- Manage

INFORMATION

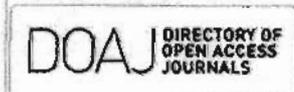
- For Readers
- For Authors
- For Librarians
- Aimscope
- Ethic
- Plagiarism

MIMBAR Template



Template
English
Version

Indexed by:



AUTHOR

Submissions

- Active (1)
- Archive (3)
- New Submission

Home > User > Author > Submissions > #2872 > Summary

#2872 SUMMARY

SUMMARY REVIEW EDITING SUBMISSION

Authors Ima Amallah, Tasya Aspiranti
 Title Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut
 Original file 2872-8622-1-SM.DOCX 2017-08-22
 Supp. files 2872-8623-1-SP.DOCX 2017- ADD A SUPPLEMENTARY FILE 08-22
 Submitter Ima Amallah
 Date submitted August 22, 2017 - 01:53 PM
 Section Articles
 Editor None assigned

STATUS

Status Awaiting assignment
 Initiated 2017-08-22
 Last modified 2017-08-22

SUBMISSION METADATA

EDIT METADATA

Authors

Name Ima Amallah
 Affiliation Universitas Islam Bandung
 Country Indonesia
 Competing interests Micro finance
 CI POLICY
 Bio Statement —
 Principal contact for editorial correspondence.
 Name Tasya Aspiranti
 Affiliation —
 Country Indonesia
 Competing interests —
 CI POLICY
 Bio Statement —

Title and Abstract

Title Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut

Abstract *Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional karena kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi tetapi juga masalah social bahkan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemiskinan berdasarkan faktor social di wilayah pegunungan Kabupaten Garut. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode survey lapangan. Sampel daerah penelitian adalah Kecamatan Talegong yang terdiri dari 7 desa dengan status desa tertinggal. Hasil dari identifikasi terpotret bahwa faktor social yang menyebabkan tingginya kemiskinan di wilayah ini karena kontur wilayah yang sangat rawan terhadap longsor dengan akses jalan yang sangat sulit yaitu jalan kecil, berubang dengan kelokan yang sangat tajam. Di sepanjang jalan menuju desa ditemukan banyak titik longsor. Selain itu, SDM yang berkualitas lebih senang tinggal di kota sehingga masyarakat yang ada di desa tetap berpendidikan rendah yang berdampak pada rendah kualitas hidup dan kesehatan yang tercermin dari berkembangnya penyakit kronis di wilayah ini.*

Indexing

Academic discipline and sub-disciplines Sosial
 Keywords Kemiskinan, Faktor Sosial, Wilayah Pegunungan
 Type, method or approach Kuantitatif Deskriptif, Survey Lapangan
 Language en

Supporting Agencies

Agencies —

OpenAIRE Specific Metadata

ProjectID —

References

References Aspiranti, Tasya, Ima Amallah, Set Suwarsi, Pupung Purnamasari. (2016). "Pemetaan Wilayah Kemiskinan di Jawa Barat Berdasarkan Indikator

ARTIKEL 10

RPP 20

RPP 10

KEYWORDS

Daya Beli Globalisasi IPM Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Islam
Keadilan Kemiskinan Kinerja Komunikasi
Matematika Media Massa Pelayanan
Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Pendidikan Perguruan Tinggi
Politik Sosial Sosial Teknologi
Terrorisme

Visitors

157,420	371
20,188	355
3,319	327
497	245
432	204

FLAG counter

Journal Help

Ekonomi,"Laporan Penelitian. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung
Badan Pusat Statistik. (2014), "Konsep Kemiskinan." Jawa Barat: BPS
Badan Pusat Statistik. (2016). "Kecamatan Talegong dalam Angka". Jawa Barat:
BPS
Hermawan, Iwan. (2012). "Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap
Pengurangan Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan,"Mimbar: Jurnal Sosial dan
Pembangunan, Vol. 28. No. 2 (Desember). 135-144. Bandung: LPPM Unisba
Jajang, Asep Saefuddin, I. Wayan Mangku, Hermanto Siregar. (2013). "Analisis
Kemiskinan Menggunakan Model Panel Spesial Statik." Mimbar: Jurnal Sosial dan
Pembangunan, Vo. 29 No. 2 (Desember). 195-203. Bandung: LPPM Unisba
Purwadinata, W.J.S.(1997), "Kamus Umum Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai
Pustaka.
Sundaya, Yuhka dan Muhardi. (2011). "Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Petani
Miskin Tanaman Pangan di Jawa Barat: Analisis dan Simulasi Kebijakan." Mimbar:
Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. XXVII.NO. 1 (Juni). 57-66. Bandung: LPPM
Unisba.
Suyanto, Bagong, 2013, Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya,
Penerbit Intrans Publishing, Malang.
Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,
Jakarta.
Zulkifli, Arif. 2013. Kemiskinan di Indonesia atau Poverty in Indonesia. Diunggah
dari <https://bangazul.com/potret-kemiskinan-di-indonesia/> pada tanggal 22
Agustus 2017

EISSN 2303-2499

ISSN 0215-8175



GUARDED BY PLAGIARISMA DONT DUPLICATE



MENDELEY



Google Analytics

Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#)
[ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [TEMPLATE](#) [SNAPP](#) [SOSIAL](#)

Home > User > Author > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE [ARCHIVE](#)

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
<i>No Submissions</i>					

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Rebacks

ALL [NEW](#) [PUBLISHED](#) [IGNORED](#)

	DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE
<input type="checkbox"/>	2017- 09-11	2	http://scholar.google.co.id/	Determinan Kemiskinan dari Faktor Sosial: Studi di Wilayah Pegunungan Kabupaten Garut	—

1 - 1 of 1 Items

[Publish](#) [Ignore](#) [Delete](#) [Select All](#)

ISSN: 2303-2472

[PROCEEDING](#)
[UNISBA](#)

[Proceeding Help](#)

USER

You are logged in
as...

Ima_amaliah

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

NOTIFICATIONS

- [View \(3 new\)](#)
- [Manage](#)

AUTHOR

Submissions

- [Active \(0\)](#)
- [Archive \(2\)](#)
- [New
Submission](#)

**JOURNAL
CONTENT**

Search

Search Scope

All

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other
Proceedings](#)

FONT SIZE

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)